



KPP Pratama Palangkaraya

LAKIN

LAPORAN KINERJA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALANGKARAYA
T.A. 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya tahun 2024 merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan mandat yang diberikan, serta laporan kinerja pencapaian visi dan misi yang dibebankan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya dalam periode Tahun Anggaran 2024. LAKIN juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, serta sebagai umpan balik guna meningkatkan kinerja secara bertahap dan berkesinambungan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya selaku unit kerja vertikal DJP memiliki tugas pokok melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang perpajakan secara keseluruhan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok dalam aktivitas sehari-hari dilakukan melalui hierarki keputusan yang terbentuk melalui suatu rantai nilai yang diorganisasikan atas dasar fungsi, sementara sistem penilaian kinerja (*performance appraisal system*) didasarkan kepada Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang menghendaki proses pengambilan keputusan pada setiap fungsi dan lini organisasi agar dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip profesionalisme dan integritas. Dengan dasar Nilai Kerja Organisasi (NKO) inilah Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya tahun 2024 dibuat.

Demikian LAKIN ini disusun guna memberikan gambaran kinerja yang jelas dan transparan serta sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Yusan Jubiantara

NIP 197003031990031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
A. Rencana Strategis	4
B. Penetapan Kinerja Tahun 2024.....	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. Capaian Kinerja Organisasi	8
A.1. Penerimaan pajak negara yang optimal	12
A.2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi.....	14
A.3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	15
A.4. Edukasi dan pelayanan yang efektif.....	15
A.5. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	16
A.6. Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	17
A.7. Penegakan hukum yang efektif.....	17
A.8. Data dan Informasi yang berkualitas	18
A.9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif.....	19
A.10. Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal.....	20
B. Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	22
DAFTAR LAMPIRAN	23

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Visi KPP Pratama Palangkaraya sebagai Kantor Pelayanan publik adalah *“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Terbaik dan Terdepan Melalui Aparatur Pajak yang Berintegritas dan Profesional”* dan dalam rangka pencapaian atas visi tersebut, KPP Pratama Palangkaraya sebagai instansi vertikal DJP mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara serta mengelola kekayaan negara secara transparan dan akuntabel, yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan. Untuk mencapai Visi tersebut, KPP Pratama Palangkaraya mempunyai suatu Misi yakni *“Menyelenggarakan Sistem Administrasi Perpajakan melalui Pelayanan Berkualitas, Edukasi dan Pengawasan yang Efektif untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.”* yang diaplikasikan ke dalam program kerja KPP Pratama Palangkaraya yang berupa Kelas Pajak; Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bendaharawan ke berbagai Instansi di lingkungan Pemda; Sosialisasi peraturan perpajakan ke Wajib Pajak; *Tax Goes to Campus; Tax Goes to School*, baik oleh KPP maupun KP2KP; dan Sosialisasi Pajak melalui media massa maupun media sosial.

Kinerja KPP Pratama Palangkaraya pada tahun 2024 dapat dilihat dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Palangkaraya Tahun 2024 adalah sebesar 109,53%. Keberhasilan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi ini merupakan hasil kerja keras para pegawai di lingkungan KPP Pratama Palangkaraya dengan semangat *“Satu Rasa, Satu Jiwa, dan Maju Bersama”* yang mengambil filosofi *“Huma Betang”*. Huma Betang adalah rumah adat masyarakat Kalimantan Tengah. Bagian atas/atap huma betang melambangkan satu rasa, badan huma betang tersebut melambangkan satu jiwa, dan tiang kaki pada huma betang melambangkan maju bersama, sehingga diharapkan seluruh pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya memiliki solidaritas tinggi dan bertekad memberikan kemajuan pada kantor. Dalam melayani wajib pajak, pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya memiliki Janji dan motto layanan, janji pelayanan berbunyi *“Memberikan Pelayanan Kepada Wajib Pajak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang Berlaku dengan didasari Integritas dan profesionalisme yang Tinggi”*, sedangkan motto layanan yang disingkat *“CANTIK”* yang merupakan kepanjangan dari *“Cepat, Akurat, Nyaman, Transparan, Ikhlas, dan Kreatif”*.

BAB I

PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 5, Palangka Raya. KPP Pratama Palangkaraya sendiri terbentuk dari proses modernisasi Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun 2008. Sebelumnya di Palangka Raya terdapat 3 (tiga) unit eselon III DJP yakni, Kantor Pelayanan Pajak Palangkaraya; Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Palangkaraya; serta Kantor Pemeriksaan Pajak Palangkaraya. Secara legal, KPP Pratama Palangkaraya didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.



Gambar 1. Bagan Organisasi KPP Pratama Palangkaraya

Sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan tengah, salah satu tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak adalah untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak di bidang perpajakan di wilayah wewenang yang meliputi satu kota dan 3 kabupaten, yakni Palangka Raya, Kabupaten Kuala Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Gunung Mas, sehingga diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat mendukung KPP Pratama Palangkaraya dalam mencapai sasaran rencana penerimaan yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp2.934.733.711.000.

Tugas pokok dalam aktivitas sehari-hari dilakukan melalui hierarki keputusan yang terbentuk melalui suatu rantai nilai yang diorganisasikan atas dasar fungsi, sementara sistem penilaian kinerja (*performance appraisal system*) didasarkan kepada Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang menghendaki proses pengambilan keputusan pada setiap fungsi dan lini organisasi agar dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip profesionalisme dan integritas. Kedua pendekatan tersebut pada akhirnya mendorong kepada terjadinya peningkatan efisiensi, kinerja individu, unit dan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagai suatu Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya digawangi oleh 94 orang pegawai yang terdiri atas satu orang pejabat eselon III, 13 orang pejabat eselon IV, 13 orang fungsional pemeriksa pajak, 3 orang penyuluh pajak, 1 orang penilai pajak dan 63 orang pelaksana struktural yang menempati seksi, subbagian, dan kelompok fungsional dalam suatu struktur organisasi serta Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya adalah sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal yang terdiri dari 1 kepala SubBagian, 1 orang bendaharawan, 1 orang sekretaris, dan 7 orang pelaksana
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data yang terdiri dari 1 orang kepala seksi, 2 orang pelaksana
- c. Seksi Pelayanan yang terdiri dari 1 orang kepala seksi dan 11 orang pelaksana
- d. Seksi Pemeriksaan, Penagihan, dan Penilaian yang terdiri dari 1 orang kepala seksi, 3 orang jurusita pajak, dan 3 orang pelaksana
- e. Seksi Pengawasan I yang terdiri dari 1 orang kepala seksi, 7 orang *Account Representative*
- f. Seksi Pengawasan II yang terdiri dari 1 orang kepala seksi, 4 orang *Account Representative*
- g. Seksi Pengawasan III yang terdiri dari 1 orang kepala seksi dan 4 orang *Account Representative*
- h. Seksi Pengawasan IV yang terdiri dari 1 orang kepala seksi dan 5 orang *Account Representative*
- i. Seksi Pengawasan V yang terdiri dari 1 orang kepala seksi dan 4 orang *Account Representative*
- j. Seksi Pengawasan VI yang terdiri dari 1 orang kepala seksi dan 4 orang *Account Representative*
- k. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari 13 orang fungsional pemeriksa, 1 orang fungsional penilai, 1 orang fungsional penyuluh, dan 2 orang asisten penyuluh.
- l. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kuala Kapuas yang terdiri dari 1 orang kepala KP2KP, 3 orang pelaksana
- m. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pulang Pisau yang terdiri dari 1 orang kepala KP2KP dan 2 orang pelaksana

- n. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kuala Kurun yang terdiri dari 1 orang kepala KP2KP dan 2 orang pelaksana

Perkembangan zaman yang dominan pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut adanya perubahan, terutama perubahan dalam pola pikir (*mindset*) dan organisasi untuk menuju sistem pemerintahan yang baik. Begitu pula dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya terus menerus beradaptasi dalam struktur organisasinya dengan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang tertuang dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak, yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2024. Dengan menjunjung visi “Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”. Sebagai wujud dukungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, DJP memiliki misi sebagai berikut:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan DJP periode 2021 – 2024 yang meliputi:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Demi terwujudnya tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya memberikan sumbangsuhnya melalui kegiatan yang dapat menunjang tercapainya optimalisasi penerimaan Negara dan reformasi administrasi perpajakan dengan berpedoman pada visi, misi, motto sebagai berikut :

VISI

“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Terbaik dan Terdepan melalui SDM yang Berintegritas dan Profesional”

MISI

“Menyelenggarakan Sistem Administrasi Perpajakan melalui Pelayanan Berkualitas, Edukasi dan Pengawasan yang Efektif untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.”

MOTTO

KPP Pratama Palangkaraya memiliki Moto Pelayanan “CANTIK” yang artinya: Cepat, Akurat, Nyaman, Transparan, Ikhlas, dan Kreatif

TUJUAN

“Melalui program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan semua Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Keuangan, melalui pola pikir (mindset), budaya kerja (cultureset), dan manajemen kinerja selalu diperbaiki sehingga kualitas pelayanan publik selalu dapat ditingkatkan sesuai dengan tuntutan masyarakat.”

SASARAN

“Tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak, serta meningkatkan kualitas pelayanan prima demi terwujudnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.”

B. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah / pengembalian tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja. Dengan kata lain penetapan kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Dokumen Penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan Kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tabel Target Indikator Kinerja Utama
Tahun 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5.	Pengawasan pembayaran masa yang	5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
8.	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		8b-CP	Persentase Penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		9c-N	Indeks Efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10.	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Demi tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, penetapan kinerja KPP Pratama Palangkaraya Tahun 2024 sangat diperlukan. Penetapan kinerja KPP Pratama Palangkaraya, terdiri dari program kerja sebagai berikut:

1. Rapat Pembinaan dan Evaluasi Bulanan;
2. *Morning Activity*;
3. Kelas Pajak;
4. In House Training;
5. *Internalisasi Corporate Value (ICV)*;
6. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bendaharawan ke berbagai Instansi;
7. Sosialisasi peraturan perpajakan ke Wajib Pajak;
8. *Tax Goes to Campus*;
9. *Tax Goes to School*, baik oleh KPP maupun KP2KP;
10. Ekstensifikasi dan Sosialisasi kepada Asosiasi sektor dominan terhadap penerimaan berdasarkan Action Plan yang telah dibuat; dan
11. Sosialisasi Pajak melalui media massa maupun media sosial.

Program kerja KPP Pratama Palangkaraya disusun semata-mata untuk mengedukasi Wajib Pajak maupun Calon Wajib Pajak agar lebih memahami dan menyadari pentingnya arti pajak bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Terlebih untuk menarik mereka peduli dan secara sadar membayar pajak dan mengawasi penggunaannya nanti. Pegawai KPP Pratama Palangkaraya sendiri pun merupakan bagian dari objek yang yang dituntut sadar dan lebih peduli terhadap pajak, bukan hanya sekedar “pegawai”. Oleh karena itu, program kerja KPP Pratama Palangkaraya tidak hanya menasar *stakeholder* eksternal, tetapi juga internalnya sendiri.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Tahun 2022

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Penerimaan pajak negara yang optimal	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	124,21%
		1b-CP Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100%	95,90%
2.	Kepatuhan wajib pajak yang tinggi	2a-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	101,39%
		2b-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	125,95%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%	113,34%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67%	80,40%
		4b-N Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	80	90,15
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	107,99%
6.	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120,00%
		6b-N Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak	100%	80,43%
		6c-N Persentase penyampaian IDLP	100%	150,00%
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	40%	45,76%
		7b-CP Efektivitas Penagihan	75%	110,07%
		7c-N Tingkat efektivitas Pemeriksaan	80%	110,85%
8.	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	120,00%
9.	SDM yang kompeten	9a-N Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	80%	96,92%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
10.	Organisasi yang berkinerja tinggi	10b-N	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	90%	99,99%
		10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85 (Skala 100)	96,46
		10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90 (Skala 100)	99,01
11.	Pengelolaan keuangan yang optimal	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5%	92,10%

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Tahun 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	104,79%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	112,98%
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	94,88%
		2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	103,76%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	124,24%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70%	84,00%
		4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	81	82,63
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	113,53%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-P	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120,00%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	120,00%
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan	80%	113,75%
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	103,02%
		7c-N	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	80%	100,00%
8.	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	153,13%
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	75,92%
9.	SDM yang kompeten	9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	82%	98,57%
10.	Organisasi yang berkinerja tinggi	10a-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85%	97,08
		10b-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	90%	100,00%
11.	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	99,48

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Tahun 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,97%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	104,72

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	101,03%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	116,29%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100,06%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88,80%
		4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	112,17%
5.	Pengawasan pembayaran masa yang	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	115,85%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	120%
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	120%
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	119,37%
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	110,35%
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%

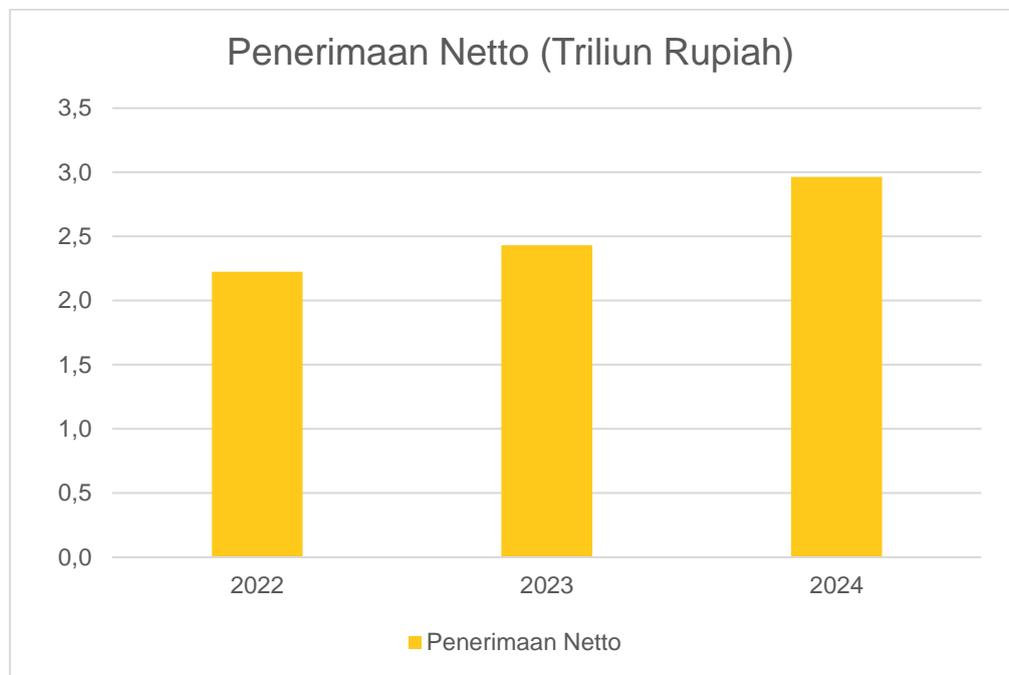
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
8.	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	115%
		8b-CP	Persentase Penghimpunan data regional dari ILAP	55%	96,63%
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	117,50
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	91,86
		9c-N	Indeks Efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	99,86
10.	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	117,43

A.1. Penerimaan pajak negara yang optimal

a. Persentase realisasi penerimaan pajak

Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya tercapai 104,79% atau Rp2.963.187.112.275 dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp2.934.733.711.000. Penerimaan tersebut tumbuh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan netto tahun lalu yang mencapai Rp2.431.014.037.290.

Secara rinci, penerimaan pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya Tahun Anggaran 2024 disumbang oleh sektor administrasi pemerintahan sebesar 45,85%, jasa keuangan dan asuransi sebesar 12,01%, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 11,58%, industri pengolahan sebesar 11,33%, perdagangan mobil dan sepeda motor 7,00%, dan sektor lainnya sebesar 12,24%.



Grafik A.1.a.1. Realisasi Penerimaan Pajak Netto Tahun 2022 s.d. 2024

Tahun	Target Netto	Realisasi Netto	Persentase (%)
2022	Rp1.791.243.711.000	Rp2.224.841.359.498	124,21%
2023	Rp2.319.877.733.000	Rp2.431.014.037.290	104,79%
2024	Rp2.934.733.711.000	Rp2.963.187.112.275	100,97%

Tabel A.1.a.1. Target dan realisasi penerimaan pajak netto tahun 2022 s.d 2024

b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Indeks pertumbuhan pajak bruto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya mencapai 104,72 dari target yang ditetapkan sebesar 100,00. Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNPB, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan

proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

A.2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 adalah sebesar 101,03% atau Rp2.773.023.438.611 dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp2.744.723.550.000. Nilai ini tumbuh sebesar 20,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) paling banyak berasal dari belanja APBN/D Bendahara satuan kerja.

b. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Palangkaraya Tahun 2024 adalah sebesar 116,29% dari target 100%. Dari target penyampaian SPT Tahunan PPh sebesar 49.957 SPT, KPP Pratama Palangkaraya berhasil menerima hingga 58.097 SPT. Perbandingan target dan realisasi penerimaan SPT pada tahun 2022 s.d 2024 tercantum pada tabel berikut:

Tahun	Target SPT Badan dan Orang Pribadi	Realisasi SPT Badan dan Orang Pribadi	Persentase (%)
2022	47.531	48.191	101,39%
2023	61.896	58.727	94,88%
2024	49.957	58.097	116,29%

Tabel A.2.b.1 Capaian Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2022 s.d. 2024

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendorong penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi adalah Pembentukan satgas penerimaan SPT Tahunan, Layanan Diluar Kantor (LDK), bimbingan teknis pembuatan bukti potong, *visit* ke pelaku usaha, membuat kelas pajak, dan kerja sama dengan berbagai stakeholder seperti Pemberi Kerja. Selain itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya telah mengupayakan penonaktifan wajib pajak secara jabatan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan.

A.3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 adalah sebesar 100,06% atau Rp190.132.492.415 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp190.010.161.000. Meskipun capaian IKU ini turun secara persentase, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM tumbuh signifikan sebesar 30,50% atau sebesar Rp44.420.658.084. Apabila dirinci berdasarkan fungsi, kinerja penerimaan pajak dari kegiatan PKM tumbuh positif secara tahunan dari fungsi pemeriksaan (+38,58%) dan penagihan (+86,55%). Sementara itu, kontribusi fungsi pengawasan bertumbuh negatif sebesar -3,86% dari tahun sebelumnya

Sesuai dengan mitigasi risiko Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya bersama dengan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) telah melakukan sinergi dan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat kepada para bendaharawan terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak atas belanja APBN dan/atau APBD melalui kegiatan Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat. Dalam menyusun strategi penerimaan seksi pengawasan membuat In House Training (IHT)/Pelatihan untuk menyamakan pemahaman strategi pengawasan antara *account representative* (AR) dan kepala seksi pengawasan.

A.4. Edukasi dan pelayanan yang efektif

a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Pada tahun 2024, capaian IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan mencapai 88,80% dari target 74% sehingga indeks capaiannya mencapai 120 (maksimal). Secara rinci, capaian tersebut terdiri dari rasio kegiatan (18,50%), rasio perubahan perilaku lapor (28,12%), dan rasio perubahan perilaku bayar (42,18%). Dalam rangka edukasi wajib pajak, berbagai kegiatan telah dilaksanakan seperti menyelenggarakan penyuluhan dengan metode tanpa tatap muka dan dengan tatap muka, menganalisis data WP Tidak Pernah Bayar dan WP Tidak Pernah Lapor untuk melaksanakan kewajiban perpajakan untuk menyampaikan SPT Tahunan melalui *E-filing*, mengirimkan pesan *Blast* kepada WP Baru dan WP TLTB yang belum melaksanakan kewajiban

perpajakan, Melakukan *Live Instagram* dengan tema Rujak (Rame-rame Ulas Pajak), menyelenggarakan BDS (*Bussiness Development Service*) di lingkungan KPP Pratama Palangkaraya dengan mengundang UMKM untuk memperdagangkan produknya, menyelenggarakan workshop untuk UKM demi meningkatkan kesadaran pajak pelaku UKM, dan tindak lanjut program Inklusi Kesadaran Pajak dengan menargetkan tenaga pendidik, guru, bendahara, dan staf administrasi lain melalui diskusi ataupun seminar.

KPP Pratama Palangkaraya telah membuat mitigasi risiko terkait kegiatan edukasi dan penyuluhan. Berdasarkan kekhawatiran akan tingkat kewajiban perpajakan dan saluran informasi yang dapat diakses oleh wajib pajak maka KPP Pratama Palangkaraya membuat mitigasi risiko seperti rutin mengingatkan Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakannya dengan cara penyuluhan langsung dan tidak langsung (kelas pajak, tax center, LDK, dll) dengan tetap memerhatikan tema penyuluhan yang telah di tetapkan. Selain itu, KPP Pratama Palangkaraya juga membuat inovasi berupa aplikasi jendela informasi perpajakan Bernama *Lalungkarang* dalam rangka meningkatkan kesadaran dan memudahkan wajib pajak.

b. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan adalah IKU yang dihitung dari survey yang diberikan ke wajib pajak. Capaian indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Pratama Palangkaraya Tahun 2024 adalah 112,17%. Capaian ini terdiri dari Indeks Kepuasan Layanan sebesar 93,16 dan Indeks Efektivitas Penyuluhan sebesar 88,54. Capaian ini merupakan capaian tertinggi dari seluruh KPP yang ada di wilayah Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Tahun 2024.

A.5. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

a. Persentase pengawasan pembayaran masa

Capaian IKU persentase pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Palangkaraya pada tahun 2024 adalah 115,85% dari target sebesar 90% sehingga indeks capaiannya mencapai 120. Secara rinci, pengawasan atas pembayaran masa terbagi menjadi dua, yakni pengawasan atas wajib pajak strategis dan kewilayahan. Secara rinci, capaian pengawasan pembayaran masa wajib pajak strategis adalah 112% dan wajib pajak kewilayahan sebesar 119,7% dengan bobot masing-masing sebesar 50%.

A.6. Pengujian Kepatuhan Material yang efektif

a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) mencapai 120% dari target 100%. Secara rinci, angka tersebut berasal dari Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis dan Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) dengan bobot masing-masing sebesar 50%.

b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan KPP Pratama Palangkaraya tahun 2024 mencapai 120% dari target 100%. Secara rinci, angka tersebut berasal dari Capaian pemanfaatan data STP dan Capaian pemanfaatan Data Matching dengan bobot masing-masing sebesar 50%. Secara rinci, sebanyak 2.118 data STP telah dimanfaatkan dari target 1.436 STP dan sebanyak 688 data matching telah ditindaklanjuti dari target 417 data.

c. Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu

Capaian IKU efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu adalah sebesar 120% dari target 100%. Nilai ini berasal dari dua komponen, yakni komponen Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu (70%) serta komponen Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan terhadap Target PKM Pemeriksaan (30%).

A.7. Penegakan hukum yang efektif

a. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Pada tahun 2024, capaian efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Palangkaraya mencapai 119,37% dari target 100%. Nilai ini berasal dari dua komponen, yakni Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (70%) yang mencapai nilai 119,1% dan Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (30%) yang mencapai nilai 120%. Setelah dikonversi, realisasi IKU ini mencapai angka 119,37.

b. Tingkat efektivitas penagihan

Efektivitas penagihan terdiri dari beberapa Tindakan penagihan antara lain Surat Teguran dengan realisasi 6.483 dari target 2805 (capaian 120%), Surat Paksa dengan realisasi 3.638 dari target 2.269 (capaian 120%), Penyitaan (SPMP) dengan realisasi 206 dari target 69 (capaian 120%), pemblokiran dengan realisasi 101 dari target 33 (capaian 107,69%), dan Penjualan Barang Sitaan dengan realisasi 27 dari target 11 (capaian 120%). Setiap poin memiliki bobot masing-masing sehingga didapatkan realisasi Efektivitas penagihan sebesar 110,35%. Setelah dikonversi, nilai indeks tingkat efektivitas penagihan mencapai 120.

c. Persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan

Capaian IKU penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan KPP Pratama Palangkaraya tahun 2024 adalah 100% dari target 100%. Target yang ditentukan adalah sebanyak 1 (satu) usulan pemeriksaan bukti permulaan per tahun. Pada tahun 2024, KPP Pratama Palangkaraya telah menyampaikan 1 (satu) usulan pemeriksaan bukti permulaan ke Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah yang telah ditindaklanjuti dengan *case building*. Dengan demikian, indeks capaian atas IKU ini adalah 100.

A.8. Data dan Informasi yang berkualitas

a. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Pada tahun 2024, capaian persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan di KPP Pratama Palangkaraya adalah sebesar 115% dari target 100%. Capaian ini terdiri dari capaian kegiatan pengamatan dan kegiatan pengumpulan data lapangan (data potensi perpajakan).

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Pada tahun 2024, terdapat total 4 (empat) kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Palangkaraya sehingga nilai capaian yang diperoleh adalah sebesar 4,4.

Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat sehingga data yang diperoleh

dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Pada tahun 2024, KPP Pratama Palangkaraya berhasil mencapai indeks 120 dalam kegiatan penyediaan data potensi perpajakan.

b. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Pada tahun 2024, capaian persentase penghimpunan data regional dari ILAP KPP Pratama Palangkaraya adalah 96,63% dari target sebesar 55%. Dengan demikian, capaian indeks atas IKU ini adalah 120. ILAP adalah Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain. ILAP mencakup seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP. Capaian ini menempatkan KPP Pratama Palangkaraya pada peringkat pertama dari seluruh KPP di wilayah Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah.

A.9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Capaian IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM KPP Pratama Palangkaraya pada tahun 2024 adalah sebesar 117,50 dari target 100. Capaian ini terdiri dari indikator komponen kompetensi seluruh pegawai serta pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh pimpinan satker (kepala kantor).

b. Indeks Penilaian Integritas Unit

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu Pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA, realisasi indeks penilaian integritas KPP Pratama Palangkaraya pada tahun 2024 adalah sebesar 91,86 dari target sebesar 85. Sehingga indeks capaian atas IKU ini adalah 108,07%.

c. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Pada tahun 2024, realisasi IKU efektivitas manajemen kinerja dan risiko mencapai 99,66 dari target 90. Nilai ini berasal dari dua komponen, yakni komponen Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja (50%) dan komponen Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko (50%). Setelah dikonversi, realisasi IKU ini mencapai angka 110,74.

A.10. Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal

a. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Pada tahun 2024, KPP Pratama Palangkaraya mencapai Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 117,43. Nilai ini meningkat signifikan dari capaian tahun lalu yakni sebesar 99,47. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran diukur berdasarkan nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja dengan masing-masing bobotnya sebesar 50%.

B. Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024.

Realisasi Belanja Negara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya (Termasuk KP2KP) pada TA 2024 adalah sebesar Rp8.268.635.380,- atau 97,47% dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp8.483.648.000,-.

Tabel 3.4
Realisasi Belanja KPP Pratama Palangkaraya
(dalam rupiah)

Program/Kegiatan	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1.776.354.000	1.735.706.838	97,71%
Ekstensifikasi Penerimaan Negara	689.864.000	687.098.788	99,60%
Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	405.913.000	384.144.286	94,64%
Pengawasan dan Penegakan Hukum	680.577.000	664.463.764	97,63%
B. Program Dukungan Manajemen	6.707.294.000	6.532.928.542	97,40%
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	5.642.003.000	5.495.062.542	97,40%
Pengelolaan Organisasi dan SDM	1.065.291.000	1.037.866.000	97,43%
TOTAL	8.483.648.000	8.268.635.380	97,47%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014).

Secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 dapat dicapai dengan baik. Secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 109.53%.

Sebagai suatu instansi vertikal pada DJP yang notabene merupakan salah satu pengelola keuangan dan kekayaan negara sekaligus sebagai penyumbang dana APBN terbesar dari sektor pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif serta timbulnya berbagai opini negatif di kalangan masyarakat mengenai birokrasi perpajakan, tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan bagi wajib pajak di bidang perpajakan secara keseluruhan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tercapainya penerimaan negara dari sektor pajak, dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya telah berhasil mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diamatkan dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak pada pencapaian IKU tahun 2024 sudah melampaui target yang telah ditentukan.

Akhirnya, penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Penyusunan LAKIN juga menjadi motivasi bagi seluruh pegawai KPP Pratama Palangkaraya untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan selalu memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders* sehingga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya dapat semakin baik dalam melayani masyarakat dengan profesional.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Palangkaraya Tahun 2024
2. Laporan Capaian IKU KPP Pratama Palangkaraya Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALANGKARAYA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.928.426.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 857.849.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 315.000.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 755.577.000
B. Program Dukungan Manajemen	Rp 6.506.104.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 5.370.810.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.135.294.000
TOTAL	Rp 8.434.530.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan
Selatan dan Tengah,



Ditandatangani Secara Elektronik
Syamsinar

Palangka Raya, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palangkaraya,



Ditandatangani Secara Elektronik
Yusan Jubiantara



NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
KPP KPP PRATAMA PALANGKARAYA
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	102,55
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,55
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,97%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,97
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	104,72	Max	P/L	19,00%	42,22%	104,72
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	103,77
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							107,48
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	101,03%	Max	E/L	26,00%	57,78%	101,03
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	116,29%	Max	P/L	19,00%	42,22%	116,29
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,06
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,06%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,06
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,30
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							116,09
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	112,17%	Max	E/M	21,00%	50,00%	112,17
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	115,85%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							112,52
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,37%	Max	P/M	14,00%	26,92%	119,37
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	110,35%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							117,88
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	115,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	115,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	96,63%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	114,76
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,09
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	91,86	Max	P/M	14,00%	33,33%	108,07
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,66	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,74
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							117,43
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	117,43	Max	P/M	14,00%	100,00%	117,43
Nilai Kinerja Organisasi								109,53

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB



djp

Laporan Kinerja
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah
T.A. 2024

www.pajak.go.id